

KOMITMEN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN ENERGI BERSIH

Anih Sri Suryani Analis Legislatif Ahli Madya anih.suryani@dpr.go.id

Audry Amaradyaputri Suryawan Analis Legislatif Ahli Pertama audry.suryawan@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan energi bersih dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global, yang menjadi fokus utama dalam United Nations Climate Change Conference ke-29 (COP29), yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan, pada 11 hingga 22 November 2024. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 8% per tahun melalui pembangunan yang ramah lingkungan, berketahanan, dan inklusif, serta mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060. Pemerintah menekankan bahwa pengembangan energi bersih akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut, dengan didukung oleh kebijakan dan program pembangunan hijau yang telah disiapkan.

Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan komitmen tersebut, Pemerintah menetapkan target peningkatan kapasitas listrik nasional hingga 100 gigawatt dalam 15 tahun mendatang melalui pembangunan pembangkit listrik baru. Ketua Delegasi Indonesia untuk COP29, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa 75% dari target tersebut akan bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti tenaga angin, surya, air, panas bumi, hingga nuklir. Upaya ini mencerminkan langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus meningkatkan kontribusi energi bersih dalam bauran energi nasional.

Dalam mendukung integrasi energi bersih ke sistem kelistrikan nasional, Indonesia juga berkomitmen untuk membangun jaringan transmisi energi bersih sepanjang 70.000 kilometer pada tahun 2040. Jaringan transmisi yang disebut *green transmission line* ini dirancang untuk menyalurkan energi ke pulau-pulau utama dan kawasan dengan populasi padat. Langkah strategis ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan akses energi bersih secara merata, tetapi juga mendukung efisiensi penyaluran energi melalui penerapan teknologi *smart transmission line*

Selain itu, komitmen Indonesia tercermin dalam pengembangan teknologi *Carbon Capture and Storage* (CCS), yang didukung oleh potensi *saline aquifer* yang luas dengan kapasitas penyimpanan karbon dioksida hingga 500 gigaton. Kapasitas ini mencerminkan peluang besar Indonesia dalam mendukung pengurangan emisi karbon dunia serta memperkuat posisi dalam perdagangan karbon global. Saat ini, Indonesia telah memverifikasi 577 juta ton kredit karbon yang siap ditawarkan kepada negara-negara maupun korporasi global. Pada COP29, Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk membuka kerja sama, di mana beberapa pihak, seperti ExxonMobil, BP p.l.c, dan Norwegia, telah menyatakan minat mereka. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup sedang memverifikasi tambahan 600 juta ton karbon yang akan ditawarkan selanjutnya. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk tidak hanya mengurangi emisi domestik, tetapi juga berperan aktif dalam upaya global mengatasi krisis iklim.

Komitmen Indonesia juga diwujudkan melalui program reboisasi pada 12,7 juta hektare kawasan hutan yang rusak secara bertahap, dengan tujuan memulihkan fungsi ekosistem, mendukung ketahanan iklim, serta meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Sebagai bagian dari upaya ini, Pemerintah berencana mengundang para ahli dari berbagai negara guna memberikan masukan serta membuka peluang pendanaan dari donor global. Ajakan kepada pemangku kepentingan global terus diperkuat pada COP29 karena program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi Indonesia, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam mengurangi pemanasan global dan menciptakan lapangan kerja hijau yang berkelanjutan.

Namun, dalam upaya pengembangan energi bersih, Indonesia menghadapi tantangan berupa realisasi bauran EBT yang belum mencapai target. Hingga semester I-2024, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan realisasi bauran EBT baru mencapai 13,93%, masih jauh dari target 23% yang ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional pada 2025. Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Mada Ayu Habsari, menilai bahwa pencapaian target ini memerlukan perbaikan regulasi yang stabil, penerapan skema Feed-in Tariff (FiT) untuk mendorong investasi di sektor EBT, serta pengalihan subsidi dari sektor batu bara ke pengembangan EBT. Selain itu, pada COP29, ditekankan bahwa transisi energi hijau memerlukan kerangka kebijakan pertumbuhan hijau yang komprehensif, investasi yang besar, dan kolaborasi internasional sebagai elemen utama.

Komitmen Indonesia dalam pengembangan energi bersih untuk menghadapi tantangan perubahan iklim global memerlukan perhatian lebih dari DPR RI, khususnya Komisi XII yang membidangi energi. Dalam rangka fungsi pengawasan, Komisi XII DPR RI perlu memantau kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan energi bersih yang telah direncanakan, seperti peningkatan kapasitas listrik, pembangunan jaringan transmisi energi bersih, pengembangan teknologi CCS, serta reboisasi kawasan hutan yang rusak. Komisi XII DPR RI juga perlu mengevaluasi pencapaian target bauran EBT. Dalam rangka fungsi legislasi, Komisi XII DPR RI perlu mendorong penyelesaian RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) sebagai dasar hukum yang mendukung pengembangan energi bersih, serta merumuskan kebijakan terkait pemberian insentif dan penerapan skema FiT guna mendorong investasi di sektor EBT.

Sumber

Bisnis Indonesia, 12 dan 13 November 2024; cnnindonesia.com, 14 November 2024; finance.detik.com, 13 November 2024;

hijau.bisnis.com, 11, 12, 13 dan 14 November 2024; industri.kontan.co.id, 13 dan 14 November 2024; liputan6.com, 14 November 2024.



Koordinator Sali Susiana Polhukam Puteri Hikmawati Ekkuinbang Sony Hendra P. Kesra Hartini Retnaningsih

Prayudi Novianto M. Hantoro Ahmad Budiman

Rachmi Suprihartanti S.

Polhukam

Dewi Sendhikasari D. Sita Hidriyah Noverdi Puia S.

Ekkuinbana Sri Nurhayati Q.

Sulasi Rongiyati Suhartono Venti Eka Satya Dewi Wuryandani Eka Budiyanti

Anih S. Suryani Teddy Prasetiawan T. Ade Surva Masyithah Aulia A. Yosephus Mainake M. Z. Emir Zanggi

Kesra

Yulia Indahri Trias Palupi K. Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja Nur Sholikah P.S. Fieka Nurul A.

Devindra R. Oktaviano

pusaka.dpr.go.id @pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024